
PENGARUH GOVERNMENT GOVERNANCE DAN PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG**Johannes Kristian Siregar**

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

email : Johannes@unibi.ac.id**Abstrak**

Fenomena yang terjadi pada RSUP Dr.Hasan Sadikin dan RSUD Kota Bandung dimana tingkat rujukan dan tingkat angka kematian yang tinggi, hal ini disebabkan oleh tingkat rujukan pasien yang sangat tinggi dari RSUD di kota dan kabupaten Bandung. Penelitian ini berjudul Pengaruh *Government Governance* dan Pelayanan Publik Rumah Sakit terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh *government governance* dan pelayanan publik terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sensus (sampel jenuh). Penelitian ini menggunakan teknik Analisis *korelasi pearson product moment*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *government governance* telah berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* pada RSU pemerintah walaupun tingkat keyakinan tidak memadai, hal ini disebabkan audit oleh pihak eksternal tidak dijalankan secara berkala. Sedangkan pelayanan publik terkait standar pelayanan publik fasilitas dan sumber daya manusia masih terdapat kekurangan pada rumah sakit umum tipe C dan D. Hasil penelitian diperoleh (1) *government governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah ; (2) pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah.

Kata kunci : *government governance*, pelayanan publik rumah sakit, kinerja rumah sakit.

Abstarct

The phenomenon that occurs in Dr.Hasan Sadikin Hospital and Bandung City Hospital where the referral rate and high mortality rate, this is caused by a very high patient referral rate from hospitals in the city and district of Bandung. This study is entitled The Effect of Government Governance and Hospital Public Services on the Performance of Government General Hospitals in Bandung City and Regency. The purpose of this study was to determine how the influence of government governance and public services on the performance of government public hospitals. The research method used is descriptive method. The sampling technique uses census techniques (saturated samples). This study uses Pearson product moment correlation analysis technique. Data collection techniques carried out by field studies and literature. The results showed that government governance has run well by applying the principles of good government governance in public hospitals even though the level of confidence is inadequate, this is because audits by external parties are not carried out regularly. While public services related to public service standards for facilities and human resources are still lacking in public hospitals types C and D. The results of the study are obtained (1) government governance does not have a significant positive effect on the performance of government public hospitals; (2) public services have a significant positive effect on the performance of government public hospitals.

Keywords: goverment governance, managerial performance and hospital service

1. PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No. 44 tahun 2009). Penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Menurut Rijadi (2005) secara alamiah rumah sakit adalah suatu badan usaha dan bukan sebuah kantor, sehingga pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien akan memaksimalkan kinerja rumah sakit tersebut, terlepas apakah rumah sakit itu milik pemerintah, yayasan atau swasta.

Rumah sakit sebagai suatu badan usaha bagi rumah sakit pemerintah bentuk kelembagaan menjadi sangat penting artinya, karena pengelolaan uang, orang, barang adalah tergantung pada Bentuk Kelembagaan tersebut. Rumah sakit sebagai organisasi nirlaba memiliki peran dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kelas rumah sakit dan standar yang telah ditetapkan. Sehingga, keberadaan rumah sakit merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 33 berbunyi : Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tatakelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*). Sesuai dengan Undang-undang No.44 Tahun

2009, pasal, 40 ayat 1, menyatakan bahwa, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali, diharapkan dengan dilakukan akreditasi pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan standar mutu dan keselamatan pasien yang lebih terjamin.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi umumnya dan era masyarakat ekonomi asean (MEA) dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit oleh karena itu rumah sakit harus melaksanakan dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah menjalankan fungsi utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat dalam hal ini kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur kinerja dan peranan pemerintah. Pada kenyataannya kinerja rumah sakit umum pemerintah masih dinilai kurang baik dimata publik terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

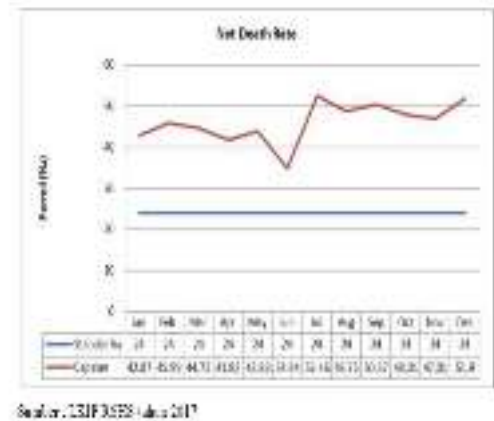
Kurang maksimalnya kinerja Rumah Sakit menyebabkan terpuruknya program pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan, dimana pemerintah melakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk BPJS Kesehatan menjadi sebuah fenomena, dimana tugas utama pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal Permasalahan yang umum terjadi dalam Rumah Sakit Pemerintah khususnya di kota Bandung terkait program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk BPJS Kesehatan diantaranya :

1. Terkait kinerja rumah sakit dimana tempat tidur pasien rawat inap yang tidak sebanding dengan jumlah pasien rawat inap yang menyebabkan masih banyaknya pasien rawat inap tidak tertangani dengan baik. Sebagai bukti bersumber dari LKIP RSUD Kota Bandung tahun 2017 dimana BTO (*Bed Turn Over*) tahun 2016 sebesar 99.89 kali yang artinya satu tempat tidur

digunakan sebanyak 99.89 kali pasien per tahun, dimana standar rumah sakit umum menurut Departemen Kesehatan sebesar 40 – 50 pasien per tahun. Hal ini menunjukkan masih kurangnya fasilitas tempat tidur dan juga sumber daya manusia terkait pasien rawat inap, dimana ketika BTO cukup tinggi akan menyebabkan TOI (*Turn Over Interval*) akan rendah yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur buruk dan menyebabkan ALOS (*Average Length of Stay*) akan rendah yang menunjukkan lamanya pasien dirawat cukup rendah.

2. Kinerja rumah sakit dilihat dari data LKIP RSUP Hasan Sadikin tahun 2017 dimana NDR (*Net death rate*) yaitu angka kematian 2 x 24 jam atau 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar mencapai 46.10 % dimana standar NDR 24 % sesuai standar Departemen Kesehatan. Terdapat gap yang cukup besar senilai 22.10 % hal ini menunjukkan buruknya kinerja rumah sakit umum Hasan Sadikin.
3. NDR tahun 2017 sebesar 46.10%. Tinggi angka kematian tersebut dipengaruhi oleh jenis kasus yang datang ke RSHS, belum optimalnya sistim koordinasi antar unit terkait dan dampak dari ketersediaan rawat inap intensif dan *high care* yang terbatas. Penyebab lainnya dikarenakan banyaknya rujukan dari rumah sakit umum pemerintah lainnya, hal ini menunjukkan buruknya kinerja rumah sakit pemerintah dengan banyaknya pasien yang tidak tertangani.

Gambar 1.1
Net death rate (NDR) Januari – Desember 2017 RSHS



Dalam menyikapi permasalahan kinerja rumah sakit, pemerintah saat ini menerapkan pentingnya melakukan *government governance* dan pelayanan publik berbasis kinerja pada rumah sakit dengan harapan kinerja dapat lebih maksimal. Selain itu pemerintah juga mewajibkan untuk setiap Rumah Sakit Umum khususnya daerah untuk dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal ini pihak eksternal. Dalam hal mencapai kinerja pemerintahan yang baik penerapan prinsip-prinsip *good government governance* (partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi consensus, berkeadilan, efektif efisien, akuntabilitas dan visi strategis) menjadi salah satu solusi dalam menyikapi fenomena yang ada terkait kinerja rumah sakit pemerintah khususnya di kota Bandung. Menurut LAN dan BPKP (2001:6) tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif dinantara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat.

Merujuk pada penelitian Azlina dan Amelia (2014) terkait pengaruh *govermanet governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan RSUD Pelalawan, dimana dengan menerapkan prinsip-prinsip GGG dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dimana penerapan prinsip GGG dan pengendalian internal meningkatkan kinerja rumah sakit dalam mengukur keberhasilan ataupun

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa bukti empiris lainnya yang menunjukkan bahwa *government governance* mempunyai efek yang positif signifikan terhadap peningkatan kinerja diantaranya penelitian Yusup (2015) terkait pengaruh *good governance* terhadap kinerja pegawai RS UNS Surakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip GG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien.

Penelitian Pratawaisadi, Dewi dan Yudartha (2016) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit terkait pelayanan pasien BPJS, hal ini disebabkan masih banyaknya kecurangan yang masih terjadi seperti ketersediaan obat dan pengajuan klaim palsu. Penelitian tersebut menyatakan penerapan prinsip GG hanya dilakukan untuk mematuhi regulasi tanpa melihat sisi moralitas yang terkait dengan pelayanan publik. Perlu ada penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor lainnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan seperti pengendalian internal yang memadai.

Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik merupakan hal utama yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hal ini menjadi tidak relevan terkait kinerja Rumah Sakit Umum khususnya di kota Bandung karena masih buruknya kinerja baik sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada.

Pelayanan publik yang baik dan penerapan *government governance* menjadi salah satu solusi yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dimana standar pelayanan publik (fasilitas dan sumber daya manusia)

dan penerapan *good government governance* dinilai apakah dapat meningkatkan kinerja pada rumah sakit pemerintah khususnya di kota Bandung. Solusi yang penulis ajukan untuk dapat membantu penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) agar dapat mencapai kinerja yang diharapkan dan menjadikan target pencapaian.

Penelitian terkait pelayanan publik dilakukan oleh Saputra (2016) pelayanan publik dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik, hal ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Okta (2017) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mendukung kinerja rumah sakit umum yakni sumber daya manusia dan fasilitas (sarana dan pra sarana), hal tersebut yang menyebabkan pelayanan rumah sakit tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit umum. Kinerja tidak dapat berjalan maksimal dilihat dari aspek fasilitas fisik dan sumber daya manusia pada RSU Islam Surabaya dimana belum memenuhi standar fasilitas (sarana dan pra sarana) dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini melatarbelakangi penelitian dengan menstruktur ulang pengaruh *Government Governance* dan Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai variabel untuk dapat menilai pengaruh terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung. Dalam usaha mencapai kinerja manajerial yang lebih baik salah satu solusi dalam menyikapi fenomena yang ada terkait kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di kota dan kabupaten Bandung dengan menerapkan *Government Governance* dan penerapan Pelayanan Publik.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Government Governance* Terhadap Kinerja Manajerial Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tatakelola pemerintahan yang baik dapat diciptakan dengan menyelaraskan prinsip-prinsip *good government governance* sesuai dengan nilai-nilai atau keinginan masyarakat. Nilai-nilai atau keinginan masyarakat diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak azasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan.

Penerapan prinsip *good government governance* diyakini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta efektif menghindari penyimpangan dan kecurangan. Menurut Sedarmayanti (2003:76) *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintahan berada pada posisi sentral dari suatu masyarakat berkembang dimana penerapan prinsip-prinsip GGG diharapkan dapat menghilangkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa pentingnya organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip GGG.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Azlina dan Amelia (2014), bahwa penerapan prinsip-prinsip GGG berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit umum pemerintah. Yusup (2015) yang menunjukkan bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip GGG berpengaruh terhadap kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian Pratawaisadi, Dewi dan Yudartha (2016) menunjukkan hal yang berbeda bahwa *government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit terkait pelayanan

pasien BPJS dimana penerapan prinsip GG hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi tanpa melihat sisi moralitas yang terkait pelayanan publik hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya terjadi kecurangan.

H₁: Pengaruh *Government Governance* (X₁) terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah (Y) di kota dan kabupaten Bandung.

2.2 Pengaruh pelayanan public rumah sakit terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung.

Merujuk pada Kemenpan No. 63 tahun 2003, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, standar pelayanan merupakan ukuran yang wajib ditaati oleh pemberi layanan. Merujuk juga pada UU No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik maka standar pelayanan publik menjadi patokan utama dalam mencapai kinerja yang baik dalam arti sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan. Dalam hal ini pelayanan publik terkait rumah sakit umum pemerintah telah ditetapkan standar pelayanannya yang terdapat pada Permenkes No. 56 Tahun 2014 terkait dengan fasilitas standar rumah sakit umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan klasifikasi rumah sakit umum pemerintah.

Fasilitas rumah sakit umum menjadi sebuah standar mutlak untuk berlangsungnya pelayanan publik terkait kesehatan masyarakat. Dapat diartikan bahwa fasilitas kesehatan pada rumah sakit umum pemerintah sangat berpengaruh dalam usaha mencapai kinerja yang maksimal oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai peran penting dalam usaha pemenuhan standar fasilitas rumah sakit umum pemerintah.

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah (rumah sakit umum pemerintah) adalah dengan menerapkan

standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik dipahami sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dimana didalamnya terdapat standar medik, farmasi, perawat, fasilitas klinis dan fasilitas non klinis yang mendukung dan mempengaruhi kinerja dari suatu rumah sakit. Kinerja akan menjadi lebih baik jika standar pelayanan publik rumah sakit umum dapat dipenuhi dan dijalankan sesuai dengan klasifikasi tipe rumah sakit umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Saputra (2016), bahwa pelayanan publik dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik dimana pelayanan publik yang baik (fasilitas dan sumber daya manusia) akan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan mendorong meningkatnya kinerja pelayanan publik. Penelitian Okta (2017) menunjukkan hal yang berbeda dimana pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja hal ini dikarenakan belum memenuhinya standar terkait fasilitas pelayanan publik, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

H2: Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum (X2) terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah (Y) di Kota dan Kabupaten Bandung.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung. Sampel penelitian ini menggunakan tehnik sensus dimana dimana penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi.

3.1.1 Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian

dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara insentif pada suatu objek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Penelitian ini menggunakan *Korelasi Pearson Product Moment*, dimana alat yang digunakan adalah SPSS 25. Penelitian menggunakan data sekunder dan primer pada Rumah Sakit Umum Pemerintah di kota dan kabupaten Bandung.

3.1.2 Korelasi Pearson Product Moment

Hipotesis diuji dengan menggunakan *Korelasi Pearson Product Moment*, yang bertujuan untuk mencari derajat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependet (Y). Mencari *Korelasi Product Moment* digunakan rumus sebagai berikut (Azwar, 2001):

$$r_{xy} = \frac{n \sum Xi Yi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan :

rx_y = Korelasi antara variabel X dan variabel Y

n = Banyak data

X = Skor total variabel X dalam bentuk interval

Y = Skor total variabel Y dalam bentuk interval

Koefisien *Korelasi Pearson Product Moment* memiliki nilai koefisien yang berkisar antara -1 sampai +1 (-1 ≤ r ≤ +1).

Jika r = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel X dan Y

Jika r = -1, terjadi korelasi negatif sempurna antara variabel X dan Y

Jika r = 0, tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y

Jika 0 ≤ r ≤ -1, terjadi korelasi positif antar variabel X dan variabel Y

Jika $-1 \leq r \leq 0$, terjadi korelasi negatif antara variabel X dan variabel Y

0,288 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

3.1.3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel independent yaitu *Government Governance* dan Pelayanan Publik Rumah Sakit serta variabel dependen yaitu Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah.

Uji parsial (uji t) merupakan uji statistik yang seringkali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji-t digunakan ketika informasi mengenai nilai ragam (variance) populasi tidak diketahui (Siregar, 2011:257). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Analisis Model

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variable bebas yaitu

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,994	20

Government Governance dan Pelayanan Publik mampu mempengaruhi Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah. Penelitian ini menggunakan data primer (data kepustakaan) dan data sekunder (kuesioner).

4.1.2. Uji Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrument dengan skor butir total (Sugiyono, 2005:258). Dalam hal ini angka kritis untuk $N = 45$ yaitu 0,288. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi lebih besar dari

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Variabel X1

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
VAR00001	0,953	0,288	Valid
VAR00002	0,968	0,288	Valid
VAR00003	0,986	0,288	Valid
VAR00004	0,987	0,288	Valid
VAR00005	0,973	0,288	Valid
VAR00006	0,963	0,288	Valid
VAR00007	0,976	0,288	Valid
VAR00008	0,975	0,288	Valid
VAR00009	0,971	0,288	Valid
VAR00010	0,973	0,288	Valid
VAR00011	0,967	0,288	Valid
VAR00012	0,970	0,288	Valid
VAR00013	0,953	0,288	Valid
VAR00014	0,918	0,288	Valid
VAR00015	0,913	0,288	Valid
VAR00016	0,946	0,288	Valid
VAR00017	0,920	0,288	Valid
VAR00018	0,941	0,288	Valid
VAR00019	0,960	0,288	Valid
VAR00020	0,981	0,288	Valid

4.1.3 Uji Reabilitas

Nilai koefisien *Cronbach Alpha* atas *Government Governance* (Variabel X1) sebesar 0,993 nilai ini lebih besar dari angka kritis atau nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0.6 , sehingga variabel sudah memenuhi kriteria reliabel.

4.1.4 Hasil Pengujian Data Penelitian *Government Governance* dan Pelayanan Publik Rumah Sakit Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung

Analisis pengujian data untuk melihat hasil penelitian dengan skala nilai pada GG dan pelayanan publik rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung di lihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Utama Skala Nilai 1 - 10

No	Rumah Sakit Umum Pemerintah	Government Governance	Pelayanan Publik Rumah Sakit	Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah
1	RSUD Kota Bandung	7.04	8.50	9.00
2	RSUD Soreang	7.44	8.03	9.11
3	RSUD Cicalengka	7.1	7.80	6.11
4	RSUD Cililin	6.76	7.26	5.55
5	RSUD Cikalong Wetan	7.66	6.92	6.44
6	RSUD Lembang	7.1	6.83	8.55
7	RSU Dr. Salamun	8.26	8.78	8.66
8	RSU Sartika Asih	8.16	8.48	8.61
9	RSU Pindad	7.84	8.83	8.22
Total		67.36	71.47	70.27
Rata-rata nilai		7.48	7.94	7.80

4.1.5 Hasil Pengujian Data Penelitian Government Governance Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung

Hasil perhitungan uji korelasi *pearson product moment* pengaruh penerapan prinsip-prinsip GGG terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung sebesar 0,435 (sig=12,1%), Ini menunjukkan *Government Governance* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah, artinya *government governance* diterapkan dengan memadai maka kinerja rumah sakit akan mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan.

Tabel 4.3
Government Governance Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah

Correlations

		Government	Kinerja
Government	Pearson	1	,435
	Correlation		
	Sig. (1-tailed)		,121
N		9	9

4.1.6 Hasil Pengujian Data Penelitian Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung

Hasil perhitungan uji korelasi *pearson product moment* pengaruh pelayanan publik rumah sakit terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung sebesar 0,543 (sig=0,66). Ini menunjukkan pelayanan publik berhasil memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja rumah sakit, artinya pelayanan publik diterapkan dengan memadai kinerja rumah sakit akan mengalami peningkatan yang signifikan

Tabel 4.4
Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah

Correlations

		pelayanan	Kinerja
pelayanan	Pearson	1	,543
	Correlation		
	Sig. (1-tailed)		,066
N		9	9

4.1.7 Pembahasan Penelitian

4.1.7.1 Government Governance Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah

Hasil korelasi *pearson product moment* menunjukkan *government governance* berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit umum Kabupaten dan Kota Bandung dengan signifikan sebesar 0,435 (sig=12.1%), t hitung 1,27 < t tabel 1,415 (sig=10%), artinya semakin baik penerapan prinsip GGG tidak

akan meningkatkan kinerja rumah sakit secara signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GGG tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerapan GGG terutama transparansi, tanggungjawab dan akuntabilitas tidak bisa diyakini kebenarannya disebabkan 6 dari 9 rumah sakit umum pemerintah belum di audit secara berkala terdapat juga yang belum pernah di audit sama sekali dari awal berdiri sampai saat ini.

Melihat peraturan dan fakta yang ada peneliti berasumsi bahwa penyebab penerapan GGG terhadap kinerja tidak memberikan dampak signifikan dikarenakan:

1. Penerapan GGG dilakukan hanya untuk mematuhi aturan saja tanpa menjadikan budaya kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
2. Mentalitas aparat birokrasi yang masih melihat output bukan outcome.
3. Rumah Sakit pemerintah belum menjalankan aturan pemerintah terkait audit eksternal secara rutin.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Pratawaisadi, Dewi dan Yudhartha (2016) yang menunjukkan bahwa *government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit, artinya semakin baik penerapan *corporate governance* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja rumah sakit.

4.1.7.2 Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah

Hasil korelasi *pearson product moment* menunjukkan pelayanan publik rumah sakit berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja rumah sakit umum pemerintah Kabupaten dan Kota Bandung dengan signifikan sebesar 0,543 (sig=6.6%), t hitung 1,71 > t tabel 1,415 (sig=10%) dan memberikan pengaruh sebesar 29,48 % terhadap kinerja rumah sakit, artinya semakin baik penerapan pelayanan publik rumah sakit

akan meningkatkan kinerja rumah sakit secara signifikan.

pelayanan publik rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 7,94. Penilaian yang masih kurang terdapat pada RSUD pemerintah pada tipe C dan D terkhususnya pada tipe D dimana masih ada yang dibawah standar yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014. Rumah sakit umum pemerintah tipe D pelayanan publik masih belum berjalan maksimal dimana dua RSUD pemerintah (RSUD Cikalong Wetan dan RSUD Lembang) berada pada ambang batas standar dan masih dibawah nilai rata-rata pelayanan publik. Tipe C dan B dapat dikatakan sudah berjalan baik dimana penilaian diatas nilai rata-rata pelayanan public.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Okta (2017) yang menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit, artinya semakin baik penerapan pelayanan publik rumah sakit tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja rumah sakit.

4.1.7.3 Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah

Hasil penelitian terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung secara keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 7,8, artinya kinerja rumah sakit pemerintah telah memenuhi standar kinerja rumah sakit umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait standar kinerja rawat inap, rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD).

Apabila ditelaah lebih mendalam RSUD pemerintah di kota dan kabupaten Bandung masih ada yang dibawah standar kinerja yang terdapat pada RSUD tipe D (RSUD Cililin, RSUD Kota Bandung, RSUD Cikalong Wetan, RSUD Lembang) terkait rawat inap dan rawat jalan. Hal ini menyebabkan tingkat kematian dan rujukan menjadi tinggi sehingga RSUD tipe yang diatasnya akan menerima limpahan pasien yang belum tentu dapat tertangani. Hal

ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada RSUP Dr. Hasan Sadikin dimana tingkat penerimaan pasien rujukan yang tinggi menyebabkan tingkat kematian menjadi tinggi atau di atas standar yang ditentukan dan menyebabkan pasien tidak tertangani dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Government Governance dan Pelayanan Publik Rumah Sakit terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kota dan Kabupaten Bandung, maka pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate governance* yang dilaksanakan oleh rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung sudah berjalan efektif dengan penilaian cukup baik. Merujuk dari hasil penelitian dimana *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah hal ini menunjukkan bahwa RSU pemerintah menjalankan prinsip-prinsip GCG hanya untuk mematuhi regulasi dan menghindari sanksi saja dibandingkan sebagai kultur dan upaya untuk meningkatkan kinerja dari rumah sakit umum tersebut.
2. Pelayanan publik rumah sakit secara keseluruhan terkait standar pelayanan publik rumah sakit umum di kota dan kabupaten Bandung sudah cukup baik. Adapun rumah sakit umum pemerintah tipe C dan D masih kurang dimana hasil penilaian masih kurang dan kurang sekali. Hal ini menunjukkan masih banyaknya kekurangan terkait standar pelayanan publik diantaranya jumlah perawat yang tidak sebanding dengan tempat tidur rawat inap, jumlah apoteker yang masih kurang, jumlah tenaga teknis farmasi yang masih kurang, serta fasilitas klinis dan non klinis yang masih tidak memadai.

3. Kinerja rumah sakit umum pemerintah secara keseluruhan di kota dan kabupaten Bandung sudah cukup baik. Adapun penilaian kurang pada rawat jalan yang menyebabkan tingkat rujukan yang sangat tinggi kepada RSU pemerintah tipe yang lebih tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan pada LKIP RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2017 dimana NDR yaitu angka kematian 2 x 24 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar mencapai 46.10 %, standar NDR sendiri yaitu 24 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menyatakan salah satu penyebab utama tingginya tingkat kematian NDR disebabkan banyaknya rujukan dari rumah sakit umum pemerintah lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2009. Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya). Jakarta : Salemba Empat.
- Arif Effendi, Muhammad. 2016. *Power of Good Corporate Governance* (Teori dan Implementasi Edisi II). Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Dalam Negeri. 2004. Pengertian Pelayanan Publik. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Jabar Provinsi. Daftar rumah sakit pemerintah di kota Bandung dan kabupaten Bandung. Diambil dari www.jabarprov.go.id.
- Kooiman, Jan. 1993. *Modern Governance : New Government – Society Interactions*. Sage.
- National Comitte on Governance. 2006. Prinsip-prinsip *Good Coporate Governance*.
- Organization of Economic Cooperation and Development. 2004. Pengertian *Good Corporate Governance*.

- Okta. 2017. Peranan standar pelayanan minimal dan kinerja terhadap kepuasan pelanggan RSUD Islam Ahmad Yani Surabaya. Surabaya : Universitas Esa Unggul.
- Permenkes 269/Menkes/III/2008. 2008. Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Jakarta : Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Pengertian Good Governance. Jakarta
- Pratawaisadi, Dewi dan Yudartha. 2016. Analisis kualitas pelayanan publik pada pasien BPJS RSUD Puri Raharja. Bali : Universitas Udayana.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Government Governance* (Kepemerintahan yang baik) dan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola perusahaan yang baik). Bandung : Mandar Maju.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. Akuntansi Keuangan Daerah (Konsep dan Aplikasi). Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang Rumah Sakit pasal 33. 2009. Pengertian Rumah Sakit. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- United National Development Program*. 1997. Prinsip-prinsip *Good Government Governance*.